KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Program tol laut, DPR dalami efektivitas subsidi
Tanggal : Rabu, 19 Juni 2019
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 26

PROGRAM TOL LAUT

DPR Dalami Efektivitas Subsidi

Bisnis, JAKARTA — Komisi V DPR segera menggelar kunjungan kerja ke daerah untuk memastikan program Tol Laut efektif menurunkan disparitas harga barang.

Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis mengatakan bahwa komisi yang dipimpinnya akan melakukan kunjungan kerja spesifik ke beberapa daerah.

"Yang lain kami setuju. Khusus subsidi Tol Laut, ada hal yang kami perlu dalami," katanya dalam Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Kementerian Perhubungan, Selasa (18/6).

Anggota Komisi V Jhoni Allen Marbun juga meminta agar subsidi terhadap program Tol Laut dievaluasi untuk memastikan efektivitas program itu.

Dia menyoroti program angkutan laut ternak yang tidak efisien karena kapal kerap kosong saat kembali dari Jakarta ke sentra produksi ternak, yakni Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Inefisiensi itu sangat disayangkan, lebih-lebih karena disubsidi.

Jhoni yang merupakan anggota Fraksi Parta Demokrat itu menyatakan lebih baik sapi bakalan asal Nusa Tenggara Timur dipotong di daerah asalnya, lalu dagingnya dibawa ke Jawa menggunakan kapal dengan kontainer berpendingin. Langkah itu juga akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat di sentra produksi ternak. "Sehingga, angkutan barang umum yang dipakai, bukan angkutan ternak. Kalau kapal ternak, baliknya bawa apa."

Jhoni juga meminta Kemenhub menyampaikan data jenis barang yang selama ini diangkut oleh kapal Tol Laut dan seberapa efektif menekan disparitas harga antara wilayah Indonesia timur dan barat.

Anggota Komisi V DPR Anton Sihombing juga menyayangkan subsidi terus menerus yang disuntikkan kepada BUMN dan swasta dalam program kapal perintis. Menurutnya, dahulu Pelni tidak pernah disubsidi. Perusahaan pelayaran pelat merah itu justru pernah menjadi salah satu penyumbang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) besar.

Dia menyarankan anggaran subsidi lebih baik direalokasikan untuk pengadaan kapal dan fasilitas pelabuhan.

"Anggaran Rp1,5 triliun [anggaran kegiatan bidang lalu lintas dan angkutan laut yang di dalamnya mengandung subsidi tol laut] itu kalau kita belikan kapal, itu kita bisa tambah 40-50 kapal. Manja sekali disubsidi," ujar anggota Fraksi Partai Golkar itu.

Program Tol Laut terdiri atas pelayanan angkutan kapal ternak, angkutan barang Tol Laut, angkutan laut perintis (termasuk biaya docking), dan penyelenggaraan kapal rede (termasuk penyelenggaraan kapal Puskesmas keliling atau kapal poliklinik).

Kemenhub mengusulkan kegiatan pelayanan angkutan kapal ternak di enam trayek pada 2020 dengan pagu indikatif Rp60 miliar, 21 trayek angkutan barang Tol Laut dengan pagu indikatif Rp349,8 miliar, 113 trayek angkutan laut perintis swasta dan Pelni dengan pagu indikatif Rp1 triliun, dan 20 unit kapal rede dengan pagu indikatif Rp30 miliar.

Empat program Tol Laut itu merupakan bagian dari kegiatan bidang lalu lintas dan angkutan laut yang pagu indikatifnya tahun depan diusulkan Rp1,7 triliun.

Dari seluruh usulan kegiatan Ditjen Perhubungan Laut, hanya program Tol Laut yang belum disetujui Komisi V DPR.

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Laut Agus H. Purnomo mengatakan akan menindaklanjuti hasil rapat, khususnya menyangkut subsidi Tol Laut.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Wisnu Handoko mengatakan pengangkutan ternak --bukan daging-- dari kawasan timur ke barat dilakukan karena mempertimbangkan preferensi konsumen di Indonesia yang lebih menyukai daging segar ketimbang daging beku. *(Sri Mas Sari)*